



## Peranan Agama dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Febrihada Gahas Candramukti

Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Madura

Febrihadagahascandramukti@gmail.com

### Abstract

*The implementation of the 2019 presidential election contest which is held simultaneously has two fundamental differences from the 2009 and 2014 elections. First, the simultaneous presidential election has issued a higher state budget, namely 25.59. Second, each presidential candidate pair has previously contested and collaborated with the vice presidential candidate who both use religion as jargon and campaign. However, the increasing number of budgets in the 2019 presidential and vice presidential election contest does not guarantee freedom from conflict. The communal conflict between the two partners and their supporters resulted in physical violence and death. This research method use descriptive qualitative, where the narrative of the writing refers to a literature study, while collecting data through literature analysis, analyzing respondents' answers through questionnaires from survey institutions and political consultants such as LSI, Political Indicator, Exit Pool. The root of the conflict stems from the existence of accounts on social media that spread verbal violence, the fanaticism of the supporter of each candidate pair, the three aggressiveness of the candidate pairs support group. The trigger for the conflict was the issue of fraud and ballot counting, the issue of criminalizing Ulama. As a result of the conflict, demonstration took place in the Bawaslu building from the central to regional levels, both of which were victims of clashes between demonstrators and security forces. The role of religion in responding to this conflict is as a unifier and peacemaker by emphasizing two important aspect, namely, first, positive interaction patterns based on Akhlakul Karimah and the principles of peace, namely cooperation, love and positive communication. Second, there is a sense of mutual defeat, releasing the aggressiveness of each candidate, which means accepting the results of elections held democratically. These two aspects are carried out integrally with good and sincere intention from the parties to the conflict.*

**Keywords:** Role of Religion, Konflik, Presidential Election 2019

### Abstrak

Pelaksanaan Kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 diadakan secara serentak memiliki dua perbedaan mendasar dengan pemilu 2009 dan 2014. Pertama, Pemilihan pilpres serentak tersebut mengeluarkan anggaran pendapatan belanja Negara lebih banyak yakni 25,59. Ke dua, masing-masing pasangan capres pernah berkontestasi sebelumnya dan menggandeng pasangan cawapres yang sama-sama menggunakan agama sebagai jargon dan kampanye. Namun meningkatnya jumlah anggaran dalam kontestasi pemilihan capres dan cawapres 2019 tidak menjamin terbebas dari konflik. Konflik komunal antara ke dua pasangan dan pendukungnya menyebabkan kekerasan fisik dan korban kematian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dimana narasi tulisanya berujukan pada studi literature, adapun pengumpulan data melalu analisis literatur, analisis jawaban responden melalui angket lembaga survey dan konsultan politik seperti LSI, Indikator Politik, Exit Pool. Akar konflik bermula dari adanya akun-akun di media social yang menebarkan kekerasan verbal, adanya fanatisme dari pendukung masing-masing paslon, ketiga sifat agresifitas dari kelompok pendukung paslon. Pemicu konflik yakni muncul isu kecurangan dan perhitungan surat suara, isu kriminalisasi Ulama. Akibat konflik adanya demonstrasi di gedung Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah, kedua terjadi korban bentroka antara pendemo dan pihak keamanan. Peranan agama dalam menyikapi konflik tersebut yakni sebagai pemersatu dan pembawa perdamaian dengan mengedapankan dua aspek penting yakni, pertama pola interaksi positif berlandaskan Akhlakul karimah dan prinsip perdamaian yaitu kerja sama, kasih sayang dan komunikasi positif. Kedua, adanya rasa saling mengalah, melepaskan sifat agresivitas dari masing-masing kandidat, artinya menerima hasil pemilihan yang diselenggarakan secara demokratis. Kedua aspek ini dilakukan secara integral dengan niat baik dan tulus dari pihak-

---

---

pihak terlibat konflik.

**Kata Kunci:** Peranan Agama, Konflik , Pilpres 2019

---

---

Received : 3 Juni 2020; Revised: 8 Desember 2020; Accepted: 15 Desember 2020

© ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

<http://doi.org/10.19105/ejpis>



## Pendahuluan

Secara historis awal mula dilaksanakan pemilihan umum dimulai tahun 1955 pasca terbitnya maklumat wakil Presiden no. X 3 November 1945 tentang dorongan pemerintah membentuk partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan 29 September 1955 diumumkan 1 Maret 1965 yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Pemilihan suara bertujuan memilih anggota DPR dan anggota konstituante dari perwakilan partai politik, namun secara umum hasil pemilu pertama tidak berfungsi. Menilik dari fakta sejarah tersebut bahwa kemunculan partai politik sistem demokrasi parlementer merupakan buah kebijakan pemerintah meskipun hasil pemilu saat itu tidak berfungsi.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dari yang sebelumnya undang-undang dasar sementara (UUDS) hingga tahun 1966. Saat itu Presiden Soekarno mencetuskan system demokrasi terpimpin yang melaksanakan system pemerintahan dan memusatkan kebijakan kepada kepala Negara. Situasi politik saat itu diwarnai ketegangan antara DPR dengan Presiden Soekarno karena tidak tercapainya keputusan mengenai rancangan keuangan yang tidak sesuai yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, imbasnya 3 Maret 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pemberhentian DPR.

Pada era saat ini, rakyat Indonesia tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden tetapi juga memilih calon anggota legeslatif (caleg DPR) dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Selain itu juga memilih dewan perwakilan daerah (DPD). Pemilihan serentak tahun 2019 anggaran pemilihan serentak lebih besar dibandingkan dua pemilu sebelumnya tahun 2009 dan tahun 2014. Anggaran logistic pemilihan umum tahun 2009 sebesar 13 triliun rupiah, tahun 2014 sebanyak 16 triliun rupiah. Pada Tahun 2019 anggaran alokasi pemilu tercatat sebanyak 25,59 triliun. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan Jumlah dana ini lebih banyak karena pemilu dilaksanakan secara serentak.

Sebagaimana diketahui khalayak bahwa penganut agama mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam, hampir 80 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia adalah muslim. Keberadaan mayoritas umat muslim di Indonesia merupakan buah dari keberhasilan para pendakwah terdahulu dalam menyebarkan agama Islam. Sebagaimana diketahui berasama bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa jalur, pertama perdagangan, perwakawinan dan politik kemudian pendidikan, metodenya pun bervariasi sesuai dengan keadaan geografi penyebarannya.

Kemudian yang menarik adalah saat para capres dan cawapres berkontestasi untuk merebut simpati rakyat dengan menggunakan tokoh agama dan label agama. Misalnya pada paslon 01 menggandeng salah satu tokoh agama yang merupakan mantan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) pusat serta aktif sebagai Ra'is Aam Syuriah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU). Disisi lain pasangan paslon nomer 02 menggunakan jargon *ijma' ulama'* sebagai bentuk ungkapan dan berita kepada masyarakat bahwa pasangan 02 merupakan pilihan dari kesepakatan para Ulama'. Dengan adanya pasangan cawapres yang merupakan dari representasi umat Islam dan jargon *Ijtima' Ulama'* kedua pasangan tersebut seharusnya berkontestasi secara damai dan khidmat sesuai dengan koridor dalam agama Islam.

Namun dana triliyunan yang dianggarkan pada penyelenggara pelaksana pemilu tahun 2019 secara serentak tersebut belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan dan kemauan mayoritas rakyat. Selain itu, adanya pasangan beraskan dari tokoh agama dan penggunaan jargon agama dari pasangan kedua paslon capres dan cawapres tersebut belum dapat dijadikan sebagai patokan untuk menciptakan pemilu yang damai dan aman. Masih banyak terdapat kejadian-kejadian yang menimbulkan gejala, pemicu dan faktor terjadinya konflik langsung di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya yakni kejadian konflik di beberapa wilayah Kabupaten yang terjadi konflik saat kampanye dan sesudah melakukan pemungutan suara. Berangkat pemaparan tulisan diatas, terdapat setidaknya dua rumusan pembahasan. (1) Bagaimana analisis konflik komunal pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. (2) Bagaimana peranan agama dalam menyikapi konflik komunal yang terjadi saat kontestasi pilpres tahun 2019

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini bedarkan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey

dan konsultan politik yang dinarasikan dengan teori konflik. Sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang konflik komunal yang kerap terjadi di Indonesia selama masa pemilu. Sumber penting lainnya di dapatkan lembaga survey Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Exit Pool dengan menyebarkan angket tentang sikap pemilih pada pemilu 2019 khususnya yang bersinggungan masalah agama. Pengelolaan data dilakukan dengan menganalisa hasil respon (responden) pada survey angket LSI. Langkah berikutnya menganalisa fenomena konflik komunal bernuansa agama yang diperoleh dari berbagai tulisan di media massa dianalisis dengan teori konflik Ibnu Khaldun, Simon Fisher dan Johan Galtung. Analisis jawaban responden tersebut setidaknya memberikan gambaran tentang sikap pemilih pada keterkaitan latar belakang calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum serentak 2019. Pada rumusan masalah pertama tentang analisis konflik, penulis menggunakan kerangka teori konflik dalam memahami situasi politik pemilihan umum serentak 2019.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada pemilu 2019 rakyat Indonesia hanya melakukan pemungutan suara sekali saja untuk menentukan kepala Negara dan wakilnya, anggota legislatif (caleg DPR) dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Selain itu juga memilih dewan perwakilan daerah (DPD). Masyarakat disugahi oleh lembaran kertas cukup besar agar dapat melihat secara jelas calon dan partai pilihan mereka. Pemilihan umum serentak ini menganggarkan dana sebesar 13 triliun rupiah, tahun 2014 sebanyak 16 triliun rupiah, Jumlah dana ini lebih banyak daripada dua kali pemungutan suara sebelumnya. Pemilihan Umum kali ini juga menggunakan agama sebagai kendaraan menarik simpati masyarakat, menurut hasil survey yang dilakukan LSI sejak bulan Januari hingga Maret bahwasanya mayoritas calon pemilih pada pemilu serentak tidak mempermasalahkan seorang tokoh agama menjadi pemimpin di negeri ini. Disamping itu, sebagian warga juga tidak terjadi konflik dan kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan pemahaman agama.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam Pasal 21 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa materi kampanye disampaikan dengan cara: a) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c) mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih; d) bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan e) tidak bersifat provokatif

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye namun konflik komunal antar kedua pasangan tidak dapat terhindarkan, bahkan pada pemilihan serentak ini terjadi konflik yang waktunya cukup lama, pasalnya pendukung dari kedua pasangan sudah terlibat konflik baik secara langsung dan tidak langsung saat masa kampanye hingga masa penentuan kemenangan bahkan pelantikan Presiden.

### **Menelaah akar konflik**

Sebelum penetapan pemenang capres dan cawapres yang diumumkan oleh penyelenggara komisi pemilihan umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019. KPU terkesan belum serius dalam menghadapi fakta bahwa akar konflik lebih banyak disebabkan oleh adanya kekerasan verbal berasal dari akun- akun bersifat kampanye hitam (Black Campaign) tidak didaftarkan secara resmi ke KPU. Jumlah tersebut semakin bertambah karena pasangan Prabowo-Sandiaga dan Jokowi- Makruf tidak mendaftarkan akun resmi kampanye Pilpresnya dan hanya melaporkan akun-akun pribadi masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa ke dua kandidat tersebut tidak mengetahui secara objektif atas tindakan, sikap, perilaku pendukungnya di media social.

Pendukung Kedua pasangan capres dan cawapres secara militant memberikan dukungan tenaga, materi dan perasaan agar dapat memenangkan pasangannya. Dukungan secara tersebut bersifat fanatik (fanatisme), secara tidak langsung merupakan konflik, meskipun itu dirasakan oleh pendukung kedua paslon. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqoddimah menuliskan yakni ada dua potensi yang terdapat dalam diri manusia yang dapat memunculkan konflik di sekitarnya. Pertama yakni cinta terhadap kelompok atau lebih dikenal dengan ashabiyah. Ashabiyah sendiri dalam Munjid 1986, 80 secara etimologi adalah ketaatan hubungan seseorang dengan kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip dan nilai- nilai yang dianut.

Manusia tidak rela jika kelompoknya atau salah satu anggota kelompoknya terhinaan, maka dengan segala upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompok manusia tersebut. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai ashabiyah berlebihan. Kedua adalah agresifitas, hakekatnya seluruh manusia memiliki sifat agresif di dalam dirinya. Sifat agresifitas berlebihan dan tidak dapat dikendalikan menyebabkan manusia mempunyai sikap *animal power* mendorong untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada sesama manusia atau makhluk lainnya.

Jika menganalisis dengan teori Ibnu Khaldun diatas bahwa akar terjadinya konflik yang pertama yakni adanya rasa cinta (Identitas) kelompok yang berasal dari masing-

masing anggota kelompok atau pengikut para kontestan. Misalnya anggota kelompok pasangan 01 tidak rela jika kelompoknya dihina oleh kelompok rivalnya. Maka kelompok yang dihina akan melakukan pembelaan. Adanya rasa cinta identitas dari kedua pasangan menimbulkan *hate speech* yang dilontarkan oleh pendukung kedua pasangan tersebut, contoh ketika para pendukung 01 memberikan sebutan pendukung 02 sebagai “kampret”. Begitupun sebaliknya saat pendukung dari 02 menjuluki pendukung 01 sebagai “cebong”. Adanya label penyebutan pada kedua pendukung kontestan menggambarkan bahwa mereka secara tidak langsung terlibat dalam konflik verbal. Selanjutnya bentuk kecintaan para pendukung masing-masing pasangan capres dan capres juga dinarasikan dalam bentuk jargon, seperti dari pasangan 02 mempunyai #2019gantipresiden dan pasangan 01 memiliki #Jokowilagi. Teori ke dua akar konflik yakni agresifitas, disini para kelompok pada pasangan kedua kontestan baik dari kubu 01 maupun 02 sangat intensive dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada dorongan-dorongan agresivitas. Hal ini timbul karena adanya kekecewaan yang muncul dari kondisi eksternal, misalnya saat ini kelompok 02 merasa kecewa dan pesimis pada kinerja yang dilakukan petahana pasangan capres dan cawapres 01. Mereka menilai masih terjadi kemiskinan dan kriminalisasi terhadap tokoh agama di Indonesia. Begitupun sebaliknya, para pendukung 01 dan tim-nya merasa kecewa dengan berbagai pelanggaran kasus yang menjerat pasangan 02. Selain itu, pasangan 01 muncul dilatari adanya wacana penegakkan sistem khilfah sebagai pengganti pancasila. Perilaku agresif dan sikap terhadap suatu golongan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjadi akar konflik mengarah mencuatnya berbagai kontradiksi antara kelompok pasangan 01 dengan kelompok 02. Salah satu Kontradiksi terlihat sangat *real* bahkan nyata ketika kelompok 02 tidak menginginkan petahana atau pasangan *incumbent* kembali berkuasa, sebaliknya juga begitu bagi petahana.

### **Faktor pemicu konflik**

Setelah mengetahui akar permasalahan berlandas pada teori Ibnu Khaldun, tibalah untuk fase berikutnya untuk memahami konflik yang terjadi saat kontestasi pilpres 2019. Dengan mencari faktor pemicu konflik, beberapa faktor pemicu terjadinya konflik. Pertama, isu kecurangan perolehan suara. Isu ini santer terdengar sebelum dan sesudah suasana pencoblosan serentak di berbagai provinsi. Sebelum pencoblosan beredar isu tentang penggelembungan surat suara, kemudian adanya surat suara yang sudah.

Pasca pencoblosan lembaga survey Indonesia merilis hasil hitung cepat (quickcount), diberitakan media televisi, online maupun cetak. Hasil hitung cepat tersebut secara keseluruhan terpaut 8-9 %, pasangan 01 memperoleh suara sebanyak 54 % dan

pasangan 02 memperoleh suara sebanyak 46 %. Hasil presentase ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden sangat ketat, menimbulkan kecurigaan, stigma negatif dari pasangan yang mengalami kekalahan. Tidak mustahil jika berbagai gelombang kerusuhan terjadi di beberapa daerah, utamanya basic pemilih dari pasangan 02. Di Pamekasan sendiri terjadi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU selama kurun waktu seminggu lebih. Unjuk rasa dilakukan menuntut kejelasan tentang kecurangan yang terjadi di beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan kota Pamekasan, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Palenggan.

Kekecewaan akan hasil Quickcount tersebut tidak hanya berhenti pada gerakan unjuk rasa, namun hingga memasuki ranah hukum, pasangan 02 menunjukkan bukti-bukti kecurangan yang ditemukan di lapangan, misalnya adanya surat suara yang tercoblos, sebelum hari pemungutan suara, adanya kampanye hitam oleh pasangan 01, adanya ketidaksamaan hasil perhitungan suara antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara. Munculnya kebijakan tentang orang gila diperbolehkan untuk melakukan pemungutan suara.

Faktor pemicu kedua adanya isu kriminalisasi Ulama atau tokoh agama. Penangkapan sejumlah tokoh dan pemanggilan tokoh-tokoh agama oleh pihak keamanan pemerintah menyebabkan situasi semakin tidak kondusif. Penanganan kasus hukum oleh pihak kepolisian pada tokoh agama yang notabene berasal dari kelompok 02 di tahun politik berdampak pada semakin tidak kondusif. Para anggota kelompok 02 tidak rela jika tokoh-tokoh agama mereka ditangkap dan dipenjara atau lebih sering di dengar dengan kriminalisasi Ulama.

### **Akibat dari konflik**

Pasca penetapan pemenang oleh penyelenggara pemilu serentak seharusnya konflik sudah selesai atau reda, kedua kontestan bisa menerima hasil pleno penghitungan suara. Apapun yang diputuskan KPU seharusnya memberikan angin sejuk setelah kurang lebih 9 bulan masyarakat Indonesia dijejali hiruk-pikuk mencari pemimpin negara. Saatnya kedua kelompok hidup dalam keteraturan, menjalankan runtintas keseharian.

Tetapi kondisi saat itu tidak seperti harapan mayoritas masyarakat, eskalasi konflik semakin memuncak, awalnya hanya konflik bersifat kontradiksi berubah menjadifase krisis dan menimbulkan berbagai akibat konflik. Fase Krisis konflik adalah suatu kejadian dimana kedua kelompok mengalami ketegangan dan kekerasan yang paling hebat, pihak yang berkonflik sudah tidak dapat menempuh jalur mediasi untuk merumuskan suatu

keputusan bersama yang mengarah pada perdamaian serta pembangunan. Komunikasi bersifat normal dan positif kemungkinan putus oleh kedua pihak terlibat konflik, tidak ada lagi sikap saling percaya antara kedua pendukung pasangan calon tersebut, komunikasi yang terjalin mengarah pada kalimat, ucapan, pernyataan yang menuduh dan menentang. Tentunya hal ini juga dapat mengarah pada terjadinya pada konflik laten, dimana perselisihan, kontradiksi tidak dapat diselesaikan secara dialog, mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian.

Akibat dari konflik lainnya yakni terjadi aksi demonstrasi yang berlangsung selama kurang lebih satu minggu tepat pada bulan Ramadhan. Aksi demonstrasi tersebut cerminan dari kekecewaan salah satu pendukung pasangan calon presiden lantaran merasa dirugikan atau tidak puas dengan sikap penyelenggara maupun pengawas pemilihan umum. Gerakan demonstrasi tersebut berujung pada kekerasan fisik hingga korban kematian diantara pendukung pasangan 02 dan aparat keamanan, suasana ibu kota dan beberapa daerah pasca penghitungan suara secara resmi oleh komisi penyelenggara pemilu (KPU) menjadi mencekam dan tidak kondusif<sup>1</sup>.

Adanya korban kematian dari salah satu paslon, menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, baik pasangan paslon 01 maupun pasangan paslon 02. Pada pasangan paslon 01, merasakan kekecewaan terhadap pendukung pasangan 02 karena tidak dapat menerima keputusan penyelenggara panitia pemilihan umum. Adapun, akibat konflik yang dirasakan, dialami pendukung pasangan 02, berupa kerugian materil maupun non materil. Kerugian materil dari pendukung pasangan 02 berwujud kehilangan hak hidup, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat. Non fisik, dirasakan keluarga korban, mereka mengalami kesedihan karena telah kehilangan salah satu anggota keluarga mereka.

**Tabel 1. Tabel ilustrasi Konflik Pilpres 2019**

<b>Eskalasi Konflik</b>	<b>Keterangan</b>
Akar Konflik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Banyaknya akun-akun media social di dunia maya yang tidak terdaftar secara resmi di KPU melakukan kekerasan non Verbal</li><li>2. Fanatisme (Cinta berlebihan terhadap suatu kelompok)</li><li>3. Agresifitas masing-masing kelompok pendukung pasangan 01 dan 02</li></ol>
Faktor pemicu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isu adanya kecurangan pemungutan dan perhitungan suara.</li><li>2. Kriminalisasi Ulama, artinya ada pendukung dari pasangan 02 merupakan seorang Ulama dipenjara</li></ol>

---

oleh pemerintah yang berstatus petahana

Akibat Konflik

1. Demonstarasi di depan gedung Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah
  2. Bentrokan antara pendemo dan aparat keamanan
- 

### **Peranan agama sebagai alat pemersatu dan perdamaian**

Ajaran agama mempunyai pengaruh cukup besar dalam dalam penyatuan berbagai persepsi setiap individu dan menciptakan perdamaian di setiap sendi kehidupan masyarakat. Dengan agama masyarakat merasa mempunyai arah dan tujuan agar dapat hidup selamat dan lebih baik. Dengan demikian agama memberikan fungsi bagi setiap pemeluknya. Salah satu fungsi agama yakni memberikan rasa solidaritas atau perekat pemersatu. Karena secara psikologis para penganutnya mempunyai keimanan dan memiliki kesamaan dalam kepercayaan serta ritual beribadah. Dalam Islam ayat yang menjelaskan arti penting persatuan dan perdamaian. Agama Islam sendiri merupakan agama *Rahmatan Lil A'lam*, artinya Islam mendapatkan predikat sebagai agama yang memberikan rahmat kepada semesta. Tentunya sebagai seorang muslim yang taat, kita tidak hanya memberikan atau mencintai seseorang yang hanya berasal dari suatu golongan atau agama tertentu, melainkan kita harus bisa mencintai dan bersifat asih kepada sesama makhluk Tuhan tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras.

Pada kontestasi pilpres 2019 predikat Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh semesta nampaknya sudah mulai bergeser, dimana agama dijadikan sebagai komoditas, alat politik praktis, dieksploitasi dan dimanfaatkan elit-elit berkepentingan demi memenuhi hasrat yang diinginkannya. Pergeseran nilai-nilai Islam tentang pemahaman *Rahmatan lil Alamin* inilah penyebab terjadinya hilangnya perdamaian di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Keterlibatan para tokoh-tokoh agama pada kontestasi pilpres 2019 seharusnya dapat memberikan panutan dan sikap yang mencerminkan keteladanan dan dapat memberikan arahan serta masukan bagi penyelesaian konflik antara kedua kelompok dengan mengedepankan pemahaman Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*, terlebih saat pengumuman pemenang dilakukan tepat menjelang *Nuzulul Qur'an* bulan Ramadhan. Dengan demikian keterlibatan para elit agama pada kedua kontestan agar mengembalikan peran dan fungsi agama sebagai pemersatu dan perdamaian.

Sikap masing-masing kontestan dan pendukungnya adalah mengedapankan Akhlakul karimah untuk kembali bersatu, tidak mementingkan egoisme kelompoknya. Hal ini, tentunya, sebagaimana dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW yang diutus ke dunia saat zaman Jahiliyah, dimana pada zaman atau masa tersebut banyak terjadi ketidakteraturan sosial. Beliau Rasulullah menggunakan Akhlakul Karimah sebagai media dakwah agar manusia mau hidup rukun. Rasulullah juga menegaskan dalam suatu riwayat Hadist Bukhari Muslim.

*“Innama Buistu Liutammima Sholihal Akhlaq*

*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.*

Pendekatan Akhlakul karimah dapat dilakukan dengan tiga prinsip, yakni prinsip sikap baik, kedua prinsip hormat kepada setiap individu terlibat konflik ketiga prinsip keadilan. Pertama setiap orang atau individu berinteraksi secara positif dengan didorong kemauan berperilaku dan sikap baik. Kedua, setiap kelompok terlibat konflik untuk saling menghargai sebagai subjek dan tidak saling mengobjekkan. Ketiga adalah memperlakukan setiap individu atau anggota kelompok dengan perlakuan adil dalam situasi yang sama. Jalan keluar berikutnya adalah adanya rasa saling mengalah antara pihak berkonflik. Perasaan mengalah juga diajarkan oleh Islam sebagai memupuk rasa kedermawanan dan menghilangkan rasa iri-dengki, dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan institusi pengadilan terkait, hal ini adalah sebagai cerminan kedewasaan dalam beragama khususnya kaum muslim sejati.

Di dalam kitab suci ayat Al-Qur'an terdapat surah yang memberikan penjelasan tentang sifat mengalah dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin). Mereka Anshar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin) mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari Kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung (Al-Hasyr 59: 9)

Ayat di atas menerangkan bahwa kaum Anshar yang terlebih dahulu beriman dan menempati Madinah, menaruh perhatian besar kepada kaum Muhajirin tidak ada rasa iri hati atau dengki serta rasa ingin menguasai terhadap kaum Muhajirin saat itu. Walaupun saat itu kaum Anshar dalam situasi kesusahan. Rasa mengalah kaum Anshar kepada Muhajirin yang diterjemahkan dalam surat Al-Hasry ayat 9 tersebut dapat di jadikan sebagai pijakan.

## **Kesimpulan**

Sokongan dana yang berlimpah dari pemerintah kepada penyelenggara pemilu serta keterlibatan para elit agama dalam kontestasi Pilpres 2019 seharusnya dapat menjadikan pemilihan umum serentak 2019 berlangsung secara damai tanpa ada konflik dan kekerasan.

Namun kenyataannya konflik komunal yang melibatkan para pendukung kedua kontestan berlangsung hingga kurun waktu cukup lama. Hal ini disebabkan pada akar konflik adanya akun-akun media social pada masing-masing paslon melakukan kekerasan non verbal. Kemudian menurut teori konflik dari Ibnu Khaldun diakibatkan adanya sifat cinta berlebihan pada identitas suatu kelompok (fanatisme). Sikap berlebihan tersebut menjadikan pandangan dari para pendukung kedua paslon bersikap tidak objektif, rentan muncul sikap kontradiksi. Tentunya berakibat munculnya konflik laten yang tidak akan pernah selesai walaupun telah ditentukan pemenangan dalam pemilihan tersebut.

Kedua adanya agresifitas dari pendukung kedua kelompok. Sikap agresifitas ini menimbulkan perlakuan mengarah pada kekerasan fisik maupun non fisik, misalnya kekerasan verbal yang tujuannya untuk mencari kesalahan dari setiap pesaing atau lawan yang dihadapinya.

Pemicu konflik disebabkan adanya isu kecurangan pemungutan, penghitungan surat suara pra dan pasca pelaksanaan oleh penyelenggara pemilihan di beberapa daerah baik di daerah pemenangan paslon pasangan 01 maupun di daerah pasangan paslon 02. Kedua berkembangnya isu tentang kriminalisasi Ulama. Dimana pada isu ini sangat vital karena melibatkan Ulama (seorang tokoh agama) Islam yang mempunyai nilai kharisma dan status sosial khusus di masyarakat. Krisis konflik terjadi pada 22 Mei 2019, menimbulkan beberapa korban fisik dari kalangan masyarakat sipil.

Peranan agama dalam menyikapi penyelesaian konflik pasca pilpres 2019 menciptakan persatuan, perdamaian mengedepankan, Akhlakul karimah yang diterapkan dengan memenuhi tiga prinsip perdamaian yakni kerja sama, kasih sayang serta menjalin komunikasi positif. Kedua, harus ada rasa saling mengalah dari masing-masing kontestan, menerima segala keputusan dari pihak penyelenggara baik itu secara yuridis maupun moril agar dapat kembali pada prinsip persatuan dan perdamaian.

## Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup lebih banyak partisipan pada regional yang berbeda sehingga data yang dihasilkan mampu merepresentasikan lebih rinci dan *up to date* mengenai konflik horizontal yang dilatarbelakangi oleh pemilihan umum.

## Referensi

Affandi, Hakimul Ikhwan. 2002. Akar konflik sepanjang zaman. Elaborasi pemikiran Ibnu Khaldun. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Al-Adang. 1998. Agama yang Berpijak dan Berpihak. Kanisius: Yogyakarta.

Al-Munjid Fil Lughoh Wal 'Alam. 1986. Kamus Munjid. Daarul Masriq: Libanon.

Camara, Dom Helder. 2000. Spiral Kekerasan. Pustaka pelajar: Yogyakarta.

Fisher Simon, Ludin Jawed, Williams Steve, Abdi Ibrahim, Smith Richard, Williams Sue. 2000. Mengelola Konflik, keterampilan dan strategi bertindak. British: Jakart

Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian. Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban. Pustaka Eureka. Surabaya

Ishomudin. 2002. Pengantar Sosiologi Agama. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Khaldun, Ibnu. 2000. Muqoddimah Ibnu Khaldun. Terjemahan oleh Ahmadi Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Khudzairi, Zainal. 1985. Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun. Terjemahan Ahmad Rofi'ie Ustmani. Yogyakarta: LSIPM

Lembaga Survey Indonesia. Quick Count Pilpres dan Pileg. 2019. Jakarta: (tidak diterbitkan)

Saiful, Mujani. 2019. Metodologi, Proses dan Hasil Qucik Pilpres & Pileg 17 April 2019 disampaikan pada pengarahan surveyor pilpres dan plieg serentak 2019. Di Grand Aston Yogyakarta.

## Jurnal / artikel onlie

Nufransa, Wirasakti. media keuangan, Tranparansi Informasi Kebijakan Fisikal. Vol. 16/ No 139/ April 2019: 5.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/12180/media-keuangan-april-2019.pdf>

diakses pada 15 Mei 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48345791>. Demo 22 Mei: Korban meninggal, dalang kerusuhan dan 'ada settingan menciptakan martir'. Diakses pada 22 Mei 2019